



BAPPEDA
Prov. Kaltim

BAPPEDA KALTIM

Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas
Buletin Triwulan III (Juli-September) 2025



www.bappeda.kaltimprov.go.id



humasbappedakaltim@gmail.com



bappeda_kaltim



KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Yusliando, S.T.



SEKRETARIS

Saur Parsaoran T, S.Pi, MEMD



KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM

Stella Felicia S., S.Si., M.UrbPlanDes.



KEPALA SUB BAGIAN UMUM

M. Isnainil Hude S.Si.

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL



KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Alfino Rinaldi Arief, S.T., M.E.



KEPALA BIDANG
PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

Berlin Frinko Sihaloho, SE.



KEPALA BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

Wahyu Gutut Purboyo, S.Pi., M.Si.



KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHANAN

Agus Taswanto, S.T., M.Ling.

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TUJUAN

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

SASARAN

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

*Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda 2024-2026





BAPPEDA
Prov. Kaltim

AWAK REDAKSI

PENERBIT

BAPPEDA PROVINSI KALTIM

PENASEHAT

YUSLIANDO, S.T.

PENANGGUNG JAWAB REDAKSI

SAUR PARSAORAN T., S.PI, MEMD.

REDAKTUR PELAKSANA

M. ISNAINIL HUDE, S.SI

PENULIS

SUCI ASHARI, S.I.KOM.

FAJAR DWI SAPUTRA, S.KOM.

PENYUNTING NASKAH

RIEKA INDAH BUDIANA, S.SOS., M.SI

DOKUMENTASI

SUCI ASHARI, S.I.KOM.

FAJAR DWI SAPUTRA, S.KOM.

DESAIN

SUCI ASHARI, S.I.KOM.

PRODUKSI DAN DISTRIBUTOR

ASERI

SENINDIYANTO

SEKRETARIAT

MUHAMMAD HENDRA WAHYUDI, S.AP.

AHMAD RIYADI, S.SOS.

SIAP BERALIH DARI BATU BARA, KALTIM PERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI HIJAU

Balikpapan (11/09) - Kalimantan Timur selama ini sangat bergantung pada batubara. Data terbaru menunjukkan, lebih dari sepertiga ekonomi Kaltim masih ditopang batubara, dan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari sektor ini. Namun, permintaan global terhadap batubara semakin menurun. Artinya, Kaltim harus bergerak cepat mencari penopang baru bagi ekonomi daerah.



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim

Inilah yang ditegaskan Gubernur Kaltim dalam audiensi bersama Tim GIZ Jerman. Beliau menekankan bahwa transformasi ekonomi bukan pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Bukan hanya soal keberlanjutan, tapi juga tentang bagaimana masyarakat Kaltim tetap memiliki lapangan kerja dan sumber penghidupan di masa depan.

Sejak 2024, Forum Konsultasi Daerah (FKD) telah merumuskan lima belas sektor prioritas, mulai dari sektor lama seperti sawit, karet, dan perikanan, hingga sektor baru seperti bioavtur, panel surya, dan green hydrogen. Kaltim juga akan jadi lokasi uji coba berbagai proyek kerja sama dengan pemerintah Jerman, yang membantu daerah mempersiapkan transisi energi berkeadilan dan mencetak lebih banyak pekerjaan hijau.

Sebagai langkah nyata, Kaltim akan jadi tuan rumah Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) & ICDP pada 13–17 Oktober 2025 di Samarinda. Acara ini akan menghadirkan 45+ delegasi internasional dari 7 negara, dengan agenda seminar, diskusi di Universitas Mulawarman, talkshow pekerjaan hijau, hingga kunjungan lapangan ke lokasi pasca tambang dan desa energi mandiri.

Bappeda Kaltim melihat langkah ini sebagai peluang besar: dari daerah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai penghasil batubara, Kaltim ingin dikenal sebagai contoh global transformasi ekonomi hijau. Proses ini tidak mudah, tapi harus dipercepat agar generasi muda Kaltim tidak lagi hanya bergantung pada tambang, melainkan punya kesempatan di sektor baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertemuan audiensi ini juga dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, pimpinan OPD terkait, serta Ade Cahyat dari GIZ Indonesia/ASEAN. (sa)



Kepala Bappeda, Gubernur, Sekretaris Daerah, dan GIZ beserta jajaran

BAPPEDA KALTIM TERIMA KUNJUNGAN KERJA BAPPENAS DAN JICA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRICITY



Dok.Humas Bappeda Kaltim

Bappeda bersama Tim JICA

Samarinda - Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari Kementerian PPN/Bappenas bersama tim ahli Japan International Cooperation Agency (JICA), Kamis (17/07/2025), dalam rangka kerja sama teknis penyusunan Tri-City Development Plan (TCDP) untuk kawasan IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

Dalam pertemuan tersebut, JICA memaparkan bahwa pengembangan Tricity bertujuan membangun kawasan terpadu yang mendukung perkembangan kota dan desa secara berkelanjutan berdasarkan tiga pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun (Juli 2025-Juli 2028). Tricity tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan isu lingkungan, sosial, budaya, dan kesetaraan gender. Selain itu, proyek ini bertujuan membentuk organisasi pelaksana khusus yang akan menjalankan rencana pengembangan Tricity secara berkelanjutan. Meski fokusnya pada IKN, Balikpapan, dan Samarinda, namun wilayah sekitar seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga dinilai relevan untuk diajak berkolaborasi sebagai penerima manfaat dari proyek ini.

Agar berjalan dengan efektif, dibentuk empat kelompok kerja tematik yang masing-masing akan membahas aspek-aspek mengenai pengembangan Tricity.



Dalam kelompok kerja tersebut mencakup tematik:

1. Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Pembangunan Infrastruktur;
2. Pengembangan Ekonomi, Industri, dan Promosi Investasi;
3. Kelestarian Lingkungan dan Perubahan Iklim;
4. Sosial, Budaya, dan Gender.

Adapun pertemuan perdana Komite Bersama (Joint Coordinating Committee/lat JCC Meeting) dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli secara hybrid. Dalam pertemuan tersebut akan menyepakati aktivitas, jadwal pelaksanaan, tema utama, posisi legal proyek TCDP (Tri-City Development Plan), serta pengajuan rencana garis besar dan analisis awal kondisi kawasan.

Bappeda Kaltim menyatakan dukungan terhadap proyek ini, namun menekankan untuk dapat didiskusikan lebih lanjut mengenai pentingnya integrasi rencana Tricity ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra, termasuk aspek penganggarannya. (SA)



PENYUSUNAN RPJMD PPU

HARUS ANTISIPATIF TERHADAP PERUBAHAN NASIONAL

Samarinda - Dalam rangka mendukung kelancaran terkait proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bappeda Provinsi Kaltim menerima kunjungan koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten PPU, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, DPRD PPU, serta Kepala Bappelitbang PPU dan staffnya, pada Kamis, (24/7/2025) di Ruang Rapat Propeda Bappeda Kaltim.

Rapat ini dipimpin oleh Saur Parsaoran, selaku Sekretaris Bappeda Kaltim, didampingi oleh jajaran staf bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil). Pertemuan ini menjembatani pemahaman substansi dan arah penyusunan RPJMD Kabupaten PPU agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun kebijakan nasional.

Dalam forum ini, Saur Parsoaran menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPJMD PPU harus mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang secara administratif masih berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan perlakuan khusus.

Selama belum ada regulasi formal yang menetapkan perubahan status administratif secara menyeluruh, maka urusan pelayanan publik dan perencanaan daerah masih menjadi kewenangan provinsi.



"Ketika regulasi belum ditentukan terkait status baru IKN, maka posisi PPU masih dalam lingkup Provinsi Kaltim. Namun apabila kelak ada kebijakan nasional yang menetapkan status baru, maka RPJMD harus disesuaikan melalui perubahan dokumen," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa RPJMD Kabupaten PPU harus selaras dengan program prioritas unggulan (progul) Gubernur Kalimantan Timur, agar tercipta kesinambungan perencanaan pembangunan antara daerah dan provinsi.

Ketua Pansus RPJMD PPU menyebutkan bahwa secara prinsip, dokumen RPJMD PPU sudah berada pada tahapan akhir penyusunan. Namun, sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan IKN masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pertemuan bermaksud untuk berkoordinasi agar proses penetapan dokumen RPJMD PPU dapat menemukan titik terang.

Harapannya, dapat memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD PPU yang lebih baik. ^(SA)

RAPAT KONSOLIDASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK), BAHAS PENGENTASAN KEMISKINAN UNTUK LIMA TAHUN KEDEPAN



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim

Samarinda - Bappeda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Rabu (3/9/2025) di Hotel Puri Senyur Samarinda. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Mispoyo, serta turut dipandu oleh Muhammad Hamsani, Ketua Tim dari Bidang PPM.

Rapat ini membahas finalisasi SK Gubernur terkait TKPK Provinsi Kaltim, menetapkan target penanggulangan kemiskinan Kaltim tahun 2025-2029, sekaligus menyusun agenda kerja TKPK untuk lima tahun mendatang.



Berdasarkan pada urgensi untuk pengentasan kemiskinan di Kaltim, perlu adanya penguatan peran TKPK hingga tingkat kabupaten/kota.

Untuk mendukung langkah tersebut, perlu optimalisasi proses verifikasi dan validasi data penduduk yang masuk dalam indikator kemiskinan.

Tercatat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE, hasil verifikasi Bulan Mei Tahun 2025 jumlah potensi kemiskinan di Kaltim mencapai 761 ribu jiwa, dengan 55 ribu jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sementara itu tiga kabupaten — Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu — melaporkan tidak memiliki kasus kemiskinan ekstrem.



Menanggapi hal tersebut, dirumuskan isu strategis kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kaltim, diantaranya penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat Provinsi maupun kota, pengembangan aplikasi kemiskinan daerah berbasis data hasil verifikasi dan validasi lapangan, internalisasi RPJMD Kaltim 2025-2029 ke dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (2025-2029) dan juga pemetaan intervensi program penanggulangan kemiskinan Tahun 2026.



Dalam pertemuan ini, turut berpartisipasi berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim diantaranya, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Forum CSR Kesejahteraan Sosial dan perangkat daerah terkait lainnya.

Melalui rapat konsolidasi ini, Bappeda Kaltim bersama TKPK berupaya untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim. (SA)

MANGROVE KALTIM JADI BENTENG ALAMI ABRASI, PERLU DUKUNGAN WARGA UNTUK PENJAGAANNYA



HUTAN MANGROVE KALTIM PERLU PENJAGAAN WARGA SEKITAR

Tidak banyak yang tahu, hutan mangrove di Kalimantan Timur termasuk yang terluas di Indonesia, mencapai lebih dari 240 ribu hektare. Mangrove bukan sekadar pohon, tetapi benteng alami penahan abrasi sekaligus habitat penting bagi ikan dan biota laut yang menopang kehidupan nelayan.

Sayangnya, kondisi mangrove di Kaltim menghadapi tantangan yang cukup serius akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan semak belukar. Jika terus berkurang, masyarakat pesisir akan terdampak: abrasi meningkat, hasil tangkapan menurun, dan perlindungan dari perubahan iklim melemah.

Isu inilah yang dibahas dalam Lokakarya Kerangka Kerja MRV di Hotel Aston Samarinda, Rabu (10/9). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Bappeda bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk menjaga pesisir sekaligus menekan emisi karbon.

Dihadiri oleh beberapa unsur, mulai dari perangkat daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPUPR-Pera, hingga Dinas Kehutanan. Hadir pula akademisi, mitra pembangunan, serta perwakilan masyarakat sipil yang peduli lingkungan.

Turut memberikan paparan diantaranya, UPT Kementerian Kehutanan yakni BPKH Wilayah IV Samarinda dan BPDAS Mahakam Berau, serta kalangan akademisi seperti Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman. Mitra pembangunan Kaltim juga turut mengisi diskusi, di antaranya M4CR Kaltim, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), serta pakar kehutanan Dr. Virni Budi Arifanti.

Wahyu Gatut Purboyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim, menegaskan bahwa "Upaya menjaga mangrove bukan sekadar program pemerintah, tapi tugas bersama. Rehabilitasi mangrove bukan hanya urusan pemerintah, tapi perlu dukungan masyarakat. Mangrove ini garda terdepan kita di pesisir," ujarnya.

Mangrove tidak hanya menahan abrasi, tetapi juga menyerap karbon sebagai bagian dari ekosistem karbon biru yang penting bagi lingkungan dan masyarakat.

Diharapkan Lokakarya ini mendorong kolaborasi pemanfaatan mangrove dan menjaganya agar pesisir terlindungi dan generasi mendatang aman dari ancaman iklim. (sa)

ATASI POKIR YANG SERING TUMPANG TINDIH, DPRD JATIM BELAJAR DARI SISTEM POKIR DI KALTIM

Samarinda - Dalam kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada Selasa (16/09), DPRD Jatim menggali pengalaman Kaltim dalam mengelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) agar tidak tumpang tindih. Selama ini, DPRD Jatim menghadapi kendala saat reses, di mana pokir baru sering muncul di tengah jalan sehingga berpotensi benturan kepentingan dan mengganggu skala prioritas pembangunan.

Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menjelaskan bahwa di Kalimantan Timur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah berjalan lebih sistematis. Seluruh pokir wajib terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak awal pembahasan RKPD. Setelah masuk ke dalam sistem, usulan tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah melalui kamus usulan.



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim

Di Kaltim sendiri, untuk mengatasi masalah terkait pokir, DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pokir yang memiliki tugas khusus membahas dan mengawal kamus usulan aspirasi. Pansus ini memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sinkron dengan arah pembangunan daerah. Setelah kamus usulan ditetapkan lewat Pansus, data dikunci sehingga tidak bisa diubah lagi di tengah jalan. Dengan cara ini, pemerintah daerah bisa lebih fokus menetapkan prioritas sesuai kapasitas anggaran yang tersedia.

Menanggapi hal tersebut, melalui wawancara singkat, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyebut praktik yang dilakukan di Kaltim merupakan langkah inovatif yang bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk dapat diadaptasi di Jatim.

“Ternyata di Kaltim kita menemukan sebuah inovasi semacam langkah untuk mengambil keputusan supaya pokir atau penyusunan ini dikunci dengan pansus sehingga lebih transparan dan tidak ada permainan di tengah secara tiba-tiba karena sudah dikunci dari awal. Saya yakin di Kaltim ini lebih transparan sehingga teman-teman DPRD merasa lebih nyaman karena sudah diamankan dengan keputusan Pansus,” ujar Ketua DPRD Jatim. (sa)



Ketua Umum DPRD Provinsi Jawa Timur
Drs. M. Musyafak Rouf

DARI BATUBARA KE ENERGI HIJAU:

KALTIM RENCANAKAN EKONOMI BERBASIS ENERGI TERBARUKAN

Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur adalah agenda besar yang tidak bisa ditunda. Ketergantungan pada batubara harus diimbangi dengan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sejak 2024, Forum Konsultasi Daerah (FKD) menjadi wadah bersama lintas aktor dalam merumuskan arah transformasi ekonomi Kaltim hingga 2045.

Pada Pertemuan ke - 3 Putaran 1 FKD, pada Selasa (16 / 09). Pembahasan berfokus pada sektor listrik dan gas Energi Baru Terbarukan (EBT), yaitu PLTS, PLTA, dan Biometana. Forum ini diawali dengan pemaparan dari PLN mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan kondisi eksisting kelistrikan di Kaltim. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim menyampaikan paparan potensi, tantangan, serta arah pengembangan sektor PLTS, PLTA, dan Biometana. Diskusi kemudian memperdalam target, aksi utama, dan aksi pendukung lintas aktor.

Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, PLN hingga swasta sepakat untuk meningkatkan investasi pada salah satu ekonomi prioritas, yaitu listrik dan gas dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang memetakan terkait pengembangan Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) dan Biometana. Adapula rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Mahakam Hulu dan Kutai Kartanegara.



"Adapun forum ini akan memberikan solusi terhadap keterbatasan jangkauan pemahaman, penerimaan, dan dukungan terhadap kebijakan TE, khususnya di luar pemerintah. Selain itu, untuk mencegah potensi kegagalan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan Transformasi Ekonomi. Target output dalam jangka pendek yaitu keluarnya Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum dan Rencana Kerja Forum, sementara target output jangka panjangnya adalah komitmen dukungan terhadap kebijakan percepatan Transformasi Ekonomi (TE)," jelas Gatut sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim.



Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kaltim
Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi., M.Si

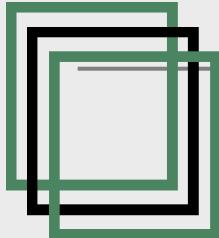
PEMETAAN EBT DI KALTIM

- PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya): Pembangunan PLTS skala besar yang sejalan dengan RUPTL, dengan memanfaatkan lahan pascatambang serta membuka peluang diversifikasi perusahaan tambang menjadi penyedia listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Saat ini terdapat beberapa PLTS terpusat antara lain: PLTS Desa Selengot Tanjung Harapan (Paser), PLTS Desa Pegat Batumpuk Pulau Derawan (Berau), PLTS Desa Menampang Kanan dan Menamang Kiri (Kutai Kartanegara), dan PLTS di Kutai Barat, Berau dan Mahakam Ulu.
- PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air): Penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) untuk legitimasi sosial, serta konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis masyarakat agar keberlanjutan pasokan air terjamin.
- Biometana: Penguatan keterhubungan supply dari PKS penghasil biometana dengan demand industri kimia, jaringan gas, kelistrikan, hingga sektor HoReCa (Hotel, Restoran, Kafe) sebagai pengganti LPG. Diskusi juga menyoroti kebutuhan standar mutu gas hijau, penguatan distribusi energi, serta dukungan regulasi teknis dari pusat dan daerah untuk seluruh pemanfaatan biometana.

Dari forum ini, perlu adanya kolaborasi untuk mewujudkannya. Pemerintah tidak bisa melakukan ini sendirian. Transformasi ekonomi dan pencapaian target bauran EBT 79% hanya dapat dicapai bila semua pihak terlibat seperti pemerintah, PLN, perusahaan tambang dan sawit, industri, perbankan, akademisi, NGO, hingga masyarakat lokal. (sa)



HABAR BAPPEDA



KEMERIAHAN LOMBA HUT 17 AGUSTUS DI BAPPEDA KALTIM



Perayaan 17 Agustus selalu jadi momen yang menyatukan kebersamaan ditengah kesibukan dan agenda yang padat di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Tahun ini, Bappeda Kaltim mengadakan sembilan cabang lomba seru diantaranya, lomba makan kerupuk, estafafet tepung, memasukkan paku ke dalam botol, estafet klereng, estafer sarung, memasukkan sedotan ke dalam botol, estafet corong, cantol kawat dan joget balon.



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim



Cabang lomba lain yang tidak kalah seru yaitu turnamen billiard dan lomba karo. Dilaksanakan selama kurang lebih dalam satu minggu, peserta sangat antusias mengikuti rangkaian lomba yang diadakan dan menunjukkan semangat sportifitasnya disetiap cabang lomba yang diikuti. Rangkaian kegiatan ditutup dengan, jalan santai bersama dan berbagai doorprize sebagai puncak acara kemerahan. (sa)

DWP BAPPEDA KALTIM BORONG

JUARA DALAM KOMPETISI FASHION SHOW DAN HIAS CUPCAKE

Samarinda - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menorehkan prestasi membanggakan dalam lomba yang digelar DWP se-Kaltim di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (20/08).



Semoga prestasi ini dapat memotivasi anggota DWP Bappeda Kaltim untuk terus berkarya dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kalimantan Timur yang lebih maju dan berdaya saing. (sa)



Dalam ajang tersebut, Dessy Ireany berhasil meraih Juara 2 Fashion Show Kebaya Merah Putih, sementara Wiji Wijayanti sukses meraih Juara Harapan 2 Fashion Show Kebaya Merah Putih. Tidak hanya itu, pada kategori Lomba Menghias Cupcake, tim DWP Bappeda Kaltim yang terdiri dari Winarsih, Siti Nur Arfah, dan Ida Yuliana juga berhasil membawa pulang Juara Harapan 1.



KALTIM EXPO: BAPPEDA RAIH JUARA 1

KATEGORI STAND TERINFORMATIF



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim



Samarinda- Bappeda Provinsi Kaltim meraih juara 1 dengan kategori Stand Terinformatif pada Kaltim Expo 2025 yang digelar selama lima hari mulai 26 hingga 30 Agustus 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, kepada Kasubbag Umum Achmad Risa.

Pameran ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-80 di Kalimantan Timur. Berbagai partisipan dari level pemerintah hingga masyarakat mengikuti pameran yang menampilkan berbagai keunggulannya. mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Provinsi maupun di lingkungan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), asosiasi pariwisata, vendor hingga berbagai paguyuban

Stand Bappeda Kaltim menampilkan berbagai informasi mengenai pembangunan dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Selama pameran berlangsung, Bappeda Kaltim melaksanakan permainan kuiz interaktif bersama pengunjung yang datang. Permainan kuis bertema seputar kemerdekaan, pembangunan di Kalimantan Timur, sejarah pembangunan dan juga tantangan unik seru. Pengunjung yang ikut berpartisipasi berkesempatan mendapatkan doorprize spesial dari Bappeda Kaltim.

Kaltim Expo 2025 menjadi wadah untuk pemerintah daerah dapat mengkomunikasikan tujuan pembangunan dan capaian pembangunan ke masyarakat secara langsung yang dikemas dengan cara yang menyenangkan dan interaktif.

Atas raihan penghargaan ini, Bappeda Kaltim terus berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang transparan, edukatif dan juga inspiratif. (sa)

71 PEJABAT BARU ASN DILANTIK, SATU PESAN GUBERNUR: KERJA TUNTAS, IKHLAS DAN BERINTEGRITAS



Dok. Humas Bappeda Prov. Kaltim

Samarinda - Sebanyak 45 pejabat administrator dan pengawas, serta 26 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Senin (29/09/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkompeten.

"Keberhasilan ASN bukan hanya diukur dari laporan kinerja, tetapi ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan. Karena itu, jadilah aparatur yang disiplin, tuntas, ikhlas, dan selalu berintegritas," pesan Gubernur.

Pelantikan ini juga diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi birokrasi, simplifikasi proses kerja, serta peningkatan dalam digitalisasi pelayanan publik. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengawal program prioritas Pemprov, khususnya GRATISPOL dan JOSPOL, agar manfaatnya bisa sampai ke masyarakat, termasuk hingga pelosok daerah.

Gubernur Rudy Mas'ud juga mengingatkan agar para ASN tidak menyalahgunakan jabatan, serta menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

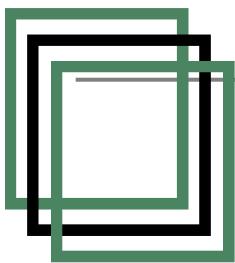


"Fokuslah pada masyarakat dan tujuan besar Kaltim menuju generasi emas. Mari bekerja dengan memberikan gagasan terbaik untuk membawa Kalimantan Timur menuju generasi emas dan semakin maju," tutupnya

Adapun nama-nama pejabat baru yang dilantik di Bappeda Kaltim:

1. Berlin Friniko Sihaloho, SE - Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Agus Taswanto, S.T., M.Ling - Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayah
3. M. Isnainil Hude, S.Si - Kepala Bagian Sub Bagian Umum.

Semoga penyegaran ini dapat membawa pada langkah nyata, integritas tinggi, dan semangat baru untuk mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. (sa)



HABAR

BANUA ETAM





Superhub Ekonomi Dalam Penyusunan Tri-City Development Plan



Tri City yang Saling Terhubung, Berkelanjutan dan Modern

Untuk mewujudkan suatu ekosistem pertumbuhan ekonomi yang terpadu, pemerintah terus berkoordinasi dalam penyusunan Tri City Development (TCDP) yang akan mengintegrasukan IKN, Balikpapan dan Samarinda. Berkolaborasi dengan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Bappenas, dan Japan Coorperation International Agency (JICA), Tri City direncanakan berstandar nasional hingga global. Selaras dengan amanat Perpres Nomor 63 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pembahasan penyusunan TCDP dilakukan pada Rabu, (13/08/2025) di Kantor Kemenko 3 IKN. Dalam agenda ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Samarinda.

Proses penyusunan TCDP mengacu pada arah pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yang menempatkan IKN sebagai kawasan Superhub Ekonomi. Dalam kurun waktu tiga tahun terhitung mulai Juli 2025 hingga Juni 2028, direncanakan konsep Tri City sudah matang, dan menghasilkan kerangka acuan berisi arahan strategis sekaligus masukan kebijakan dalam pembangunan tiga kota tersebut.



Dok. Humas OIKN



Page 19

Dalam forum ini, JICA menyampaikan limimasa penyusunan, peta jalan, visi hingga misi dari Tri City Development.

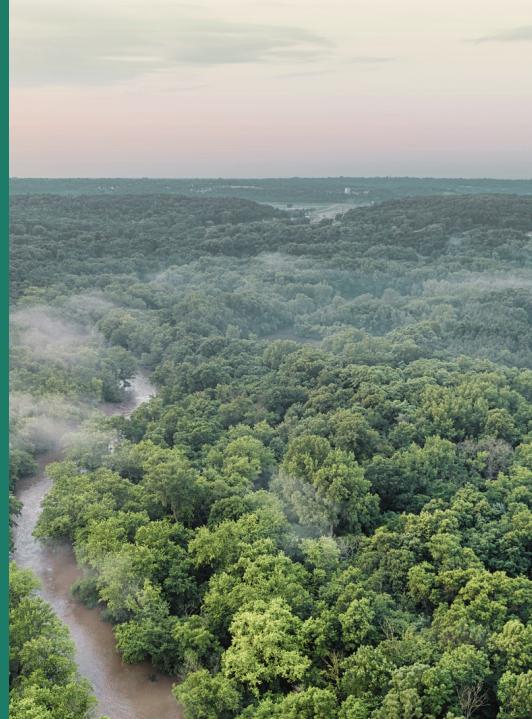
Pembahasan penyusunan TCDP dilakukan pada Rabu, (13/08/2025) di Kantor Kemenko 3 IKN. Dalam agenda ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Samarinda.

“Dalam kerangka acuan ini, kita memiliki cita-cita utama dengan visi Establishing a Greater Tri-City Development Ecosystem yang mana akan menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Visi ini diharapkan dapat memandu langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kota yang saling terhubung, maju, dan ramah lingkungan.” Ucap Yasuo Kanami, Team Leader Regional Development / Economic Development JICA.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan OIKN, Mia Amalia, menjelaskan bahwa TCDP tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga acuan untuk menyempurnakan rencana pembangunan yang telah ada. “Pendekatannya harus menggunakan regional planning, mencakup infrastruktur, lingkungan, dan sosial. Output-nya tidak perlu menunggu 2028, namun data dan temuan awalnya dapat digunakan untuk memperbaiki rencana yang sudah berjalan,” ujarnya.

Ditargetkan Juni, 2028, TCDP dapat melahirkan produk peta jalan strategis sebagai panduan pembangunan Tri City, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola, integrasi infrastruktur, dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Diharapkan, sinergi ini mampu melahirkan superhub ekonomi baru yang mampu menyedot investasi global dalam skala besar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkokoh posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Diharapkan, masyarakat Kaltim dan sekitarnya dapat segera merasakan kekuatan tiga kota yang menjadi roda perekonomian di Indoensia timur. IKN, Samarinda, dan Balikpapan akan menjadi pilar perekonomian yang saling terhubung, inklusif, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang .

(Sumber: <https://www.ikn.go.id/penyusunan-tri-city-development-plan-cetak-superhub-ekonomi-baru-di-kalimantan-timur>)



PEMBANGUNAN HIJAU DAN RENDAH EMISI UNTUK KALTIM MELALUI DUKUNGAN FCP-CF

Samarinda - Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) - Carbon Fund (CF) merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, degradasi hutan dan juga pelestarian hutan.

Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan program FCPF-CF dan telah berjalan selama lebih dari lima tahun. Program ini selaras dengan *Paris Agreement* Pasal 5 Ayat 2, yang mendorong mekanisme REDD+ atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan berbasis hasil.

Program ini merupakan hasil perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan FCPCF yang bekerja sama dengan bank dunia.

Menargetkan emisi sebesar 22 juta ton karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dari total 12,5 juta hektare kawasan hutan di Kalimantan Timur, program ini mencakup sekitar 6,5 juta hektare kawasan hutan yang dilindungi dari deforestasi dan degradasi.

Semenjak penerimaan dana awal di tahun 2023, telah disalurkan ke sejumlah pihak diantaranya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), Taman Nasional Kutai (TNK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan juga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Dukungan dana dari FCPF-CF akan mendorong penguatan implementasi pengurangan emisi dan deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur sebagai *pilot project* pada tingkat sub-nasional melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja yang akan diukur menggunakan indikator *outcome*.

Adapun penerima manfaat dari Program FCPF diantaranya masyarakat (masyarakat adat dan masyarakat lokal), pemerintah (provinsi hingga desa) dan kelompok usaha. Besarnya manfaat diterima para penerima manfaat akan berbanding lurus dengan kontribusi yang telah dikeluarkan sesuai tingkat kerumitan implementasi yang dilakukan masing-masing pihak terlibat.

Dalam dokumen ER-PIN (*Emission Reduction Program Idea Note*) memandatkan bahwa dana yang diberikan harus dilakukan sesuai rencana pembangunan jangka menengah pada semua tingkatan, baik nasional sampai ke tingkat desa. Pada implementasi tingkat desa, kegiatan dilakukan dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Masyarakat lokal dan kelompok adat yang berada di desa, merupakan aktor penggerak yang penting dalam mensukseskan program FCPF. Program yang diimplementasikan di desa disebut Program Desa Hijau. Program ini mencakup beberapa kegiatan untuk mendukung pembangunan hijau berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat desa dan juga kelompok adat. Beberapa aspek program FCP-CF diantaranya: Dukungan pembangunan hijau berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat ekonomi langsung dan solusi holistik yang mendukung pembangunan yang saling berkaitan antara lingkungan dan ekonomi.

Diharapkan setelah dukungan intensif FCPF ini, prinsip Desa Hijau dan pengimplementasian skema REDD+ tetap berkelanjutan dan menjadi arah pembangunan utama di desa, dan mendapatkan dukungan pendanaan secara mandiri melalui APB Desa dalam jumlah yang memadai. ^(sa)



Dok. DPMPTSP Provinsi Kaltim



Dok. tribratakutim.com

KALTIM MENCATAT ANGKA KEMISKINAN TERENDAH DALAM 1 DEKADE

Dalam sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, angka tingkat kemiskinan paling rendah yakni sebesar 5,17% pada Maret 2025. Presentase ini menandai penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya dengan presentase 5,51% pada September 2024.

Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai program sosial baik dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan seperti program Rumah Layak Huni (RLH), peningkatan kapasitas SDM dengan program Keluarga Harapan (PKH), mendorong perusahaan untuk mengarahkan program tanggung jawab sosial (CSR) secara optimal, pemberian beasiswa, bantuan usaha ekonomi hingga bantuan pelatihan kerja.

Capaian ini akan terus ditingkatkan agar tingkat kemiskinan terus menurun dan masyarakat Kaltim terbebas dari kemiskinan ekstrem secara permanen. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah meurumuskan misi pembangunan daerah yakni, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera, Transformasi ekonomi inklusif yang berbasis industrialisasi dan komoditas unggulan daerah. Hal tersebut juga tertuang dalam (tujuh) program unggulan gubernur dan wakil gubernur yakni Gratispol diantaranya: Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3, Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan, Gratus Makanan Bergizi, Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Haji dan Umrah bagi Marbot.

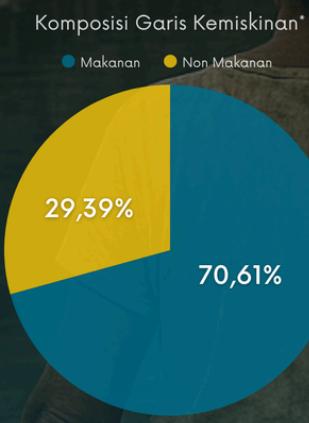
Namun, meski mengalami penurunan, data statistik terbaru juga menunjukkan kesenjangan tingkat kemiskinan yang tinggi, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan.



TINGKAT KEMISKINAN MENURUN

KALIMANTAN TIMUR Sept 2024 - Mar 2025

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 43/07/64/Th. XXVIII, 25 Jul. 2025



Komposisi garis kemiskinan didominasi oleh kebutuhan pangan dibanding non-makanan.

*Berdasarkan data terakhir BPS pada Maret 2025

Sumber Data: BPS Provinsi Kaltim

01

Presentase Penduduk Miskin

- Sept. 2024: **5,51%**
- Maret 2025: **5,17%**
- Turun **0,34%** dalam 6 bulan terakhir

02

Garis Kemiskinan per Kapita Perbulan

- Sept. 2024: **Rp 853.997,-**
- Maret 2025: **Rp 866.193,-**

03

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Naik.

- Sept. 2024: **0,606**
- Maret 2025: **0,878**

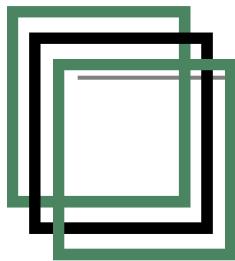
04

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Naik.

- Sept. 2024: **0,104**
- Maret 2025: **0,222**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan kemiskinan (P2) melonjak lebih tinggi dibanding periode September 2024. Artinya, meskipun angka kemiskinan berkurang, mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan masih mengalami kemiskinan yang lebih dalam.

Kesimpulannya, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur menurun. Namun, tantangan kemiskinan masih menjadi tugas bersama Pemerintah Kaltim untuk memberbaiki ketimpangan, kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.



HABAR BAPPENAS

BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Ministerial Visit and Launch of
Cooperation Program 2025-2028

Jakarta, 1 October 2025



KERJASAMA INDONESIA-SWISS 2025-2028

Untuk Mewujudkan Misi Indonesia Emas 2045

Jakarta - Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan upaya untuk mendukung Misi Indonesia Emas 2045, salah satunya dengan menjalin kemitraan bilateral dengan negara Swiss. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima kunjungan resmi delegasi Swiss yang dipimpin oleh Federal Councillor of the Swiss Confederation and Head of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) Guy Parmelin, di Kantor Bappenas, Rabu (1/10) malam.



Program ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk masa depan. Semoga program dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mensukseskan harapan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Sumber: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/indonesia-swiss-luncurkan-program-kerja-sama-strategis-2025-2028-dukung-indonesia-emas-2045-1tLif>

Dalam pertemuan tersebut membahas hal-hal berkaitan dengan kerja sama ekonomi dan pembangunan. Kunjungan ini turut menandai peluncuran secara resmi atas the Economic Cooperation and Development Programme 2025-2028. Program ini merupakan inisiatif bersama yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia serta mendukung implementasi perjanjian perdagangan bebas.

ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT PROGRAMME 2025-2028

Kunjungan ini menandai peluncuran secara resmi atas the Economic Cooperation and Development Programme 2025-2028. Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dan implementasi perjanjian perdagangan bebas. Program ini mencerminkan nilai-nilai dan komitmen untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Swiss berkomitmen untuk membuka peluang bagi masyarakat muda dalam meningkatkan daya saing dan merancang solusi pembangunan yang menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Cooperation Programme dengan SECO ini berfokus pada tiga prioritas: kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk kesejahteraan, sumber daya manusia yang inklusif dan kompetitif, dan infrastruktur berkelanjutan dengan kota yang tangguh.

PERKOKOH STRATEGI ANTI KORUPSI NASIONAL, Bappenas Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta – Sebagai langkah mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Compliance Forum dengan tema Penguatan Integritas dan Akuntabilitas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional yang Lebih Baik di Gedung Bappenas, Kamis (25/9). Berlandaskan Asta Cita, pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi salah satu prioritas yang perlu ditangani. “Indonesia bisa maju lebih baik lagi, kalau kita bersama-sama menjaga dan memperkuat pencegahan korupsi. Kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi pemberantasan korupsi mulai dari hulu sampai ke hilir,” papar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuryanti.

Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2024, Indonesia masuk kategori rentan korupsi dengan indeks Integritas Nasional 71,53. Dengan angka tersebut, perlu adanya perencanaan yang strategis untuk mencegah tingkat korupsi terus meningkat.

Korupsi dimulai dari penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang/jasa yang fiktif, penyalahgunaan APBN/APBD, serta suap atau pemerasan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kementerian PPN/Bappenas merancang strategi pencegahan korupsi dengan penguatan tata kelola, penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko, penguatan nilai integritas, hingga optimalisasi sistem informasi. Pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh pihak dan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kantor Staf Presiden menjadi bagian dari Tim Nasional Pencegahan Anti Korupsi. Tim ini bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, hingga evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas turut melakukan pengawasan internal terhadap manajemen risiko, indikasi pelanggaran yang merugikan negara, serta koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Melalui forum ini, diharapkan dapat menurunkan angka tingkat korupsi dan menguatkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabilitas, sehingga perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan dengan baik.

sumber: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/dikung-stranas-pencegahan-korupsi-bappenas-perkuat-integritas-dan-akuntabilitas-perencanaan-pembangunan-nasional-a96zs>



STRATEGI TRANSFORMATIF UNTUK DUKUNG PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN

Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas luncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 sebagai dukungan untuk perkuat pembangunan di perkotaan yang seimbang. Bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Program ini diluncurkan untuk mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas dan juga terpadu untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

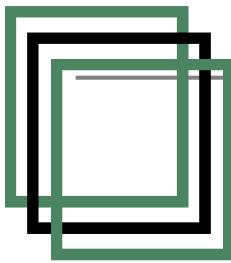
Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyatakan urgensi dokumen KPN sebagai peta jalan pembangunan perkotaan. "Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional," papar Menteri Rachmat Pambudy.

Di tahun 2045, penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat sebesar 72,9 persen. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah. Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan hanya menaikkan PDB per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

KPN 2045 dirancang sebagai *living document* yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan. Dokumen ini mensinergikan antara pemerintah pusat dan kota untuk berkomitmen membangun perkotaan yang inklusif, tangguh dan berdaya saing global.

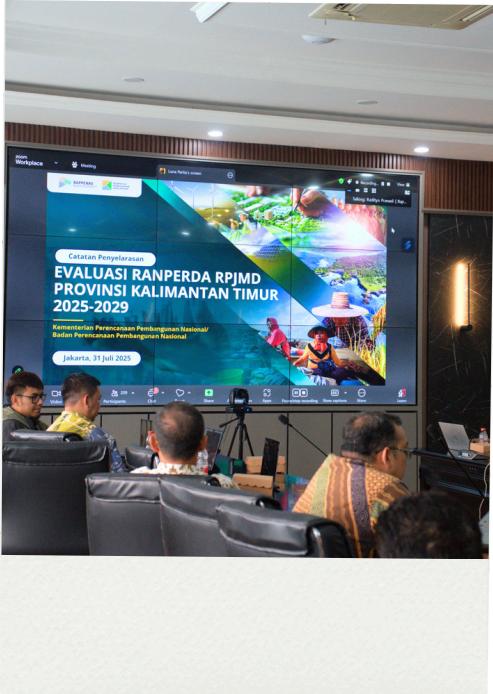




LENSA BAPPEDA

JUL-SEPT











BAPPEDA
Prov. Kaltim



[bappeda_kaltim](https://www.instagram.com/bappeda_kaltim/)



humasbappedakaltim@gmail.com



bappeda.kaltimprov.go.id